

Katalog : 4102004.5105

# Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KLUNGKUNG**



# Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung 2017



# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KLUNGKUNG 2017**

ISBN: 978-602-6840-34-9  
Nomor Publikasi: 51050.1813  
Katalog: 4102004.5105

Ukuran Buku: 17,5 cm X 25 cm  
Jumlah Halaman: xvi + 64 halaman

Naskah:  
BPS Kabupaten Klungkung

Gambar Kulit:  
BPS Kabupaten Klungkung

Diterbitkan Oleh:  
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung  
Jalan Raya Besakih, Akah, Semarapura, Klungkung  
Telp. (0366) 21180 Fax. (0366) 24242  
E-mail: bps5105@bps.go.id

Dicetak Oleh:  
Percetakan Arysta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk  
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## KATA PENGANTAR



**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung 2017** merupakan publikasi yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Klungkung antar waktu ke waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan Dinas terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk 2010-2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan masukan selalu diundang dan dihormati dalam rangka penyempurnaan terbitan yang akan datang. Kami juga mengembangkan diskursus yang berkualitas untuk mengawal pembangunan ekonomi Kabupaten Klungkung. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, November 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Klungkung



Ir. A.A.A. Raka Suarningsih



## DAFTAR ISI

1. KEPENDUDUKAN	1
2. KESEHATAN DAN GIZI	11
3. PENDIDIKAN	21
4. KETENAGAKERJAAN	29
5. TARAF DAN POLA KONSUMSI	37
6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	41
7. KEMISKINAN	51
8. SOSIAL LAINNYA	57



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klungkung, 2010-2020 (ribu jiwa) ...	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Klungkung, 2013-2017 .....	6
Tabel 1.3	Proporsi Wanita Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	8
Tabel 1.4	Persentase Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	9
Tabel 2.1	Persentase Anak Usia 0-59 bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	13
Tabel 2.2	Persentase Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun Yang Masih Diberi Asi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	15
Tabel 2.3	Persentase Persalinan Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	16
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Menurut Lama Keluhan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	17
Tabel 2.5	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan dan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2016-2017 .....	19
Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	22
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	24

Tabel 3.3	Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	25
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	26
Tabel 3.5	Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klungkung, Tahun Ajaran 2013/2014-2016/2017 .....	27
Tabel 4.1	TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2014-2015 &2017 .....	29
Tabel 4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klungkung (Persen), 2014-2015&2017.....	31
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2014-2015&2017.....	32
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2014-2015&2017.....	33
Tabel 4.5	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2014-2015&2017.....	35
Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Klungkung, 2016-2017 .....	38
Tabel 5.2	Distribusi Pendapatan Kabupaten Klungkung, 2013-2017 .....	39
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 ..	43
Tabel 6.2	Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017..	44
Tabel 6.3	Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017..	44

Tabel 6.4	Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	45
Tabel 6.5	Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .	47
Tabel 6.6	Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .....	48
Tabel 7.1	Indikator Kemiskinan Klungkung, 2016-2017 ...	54
Tabel 8.1	Persentase Penduduk Yang Bepergian Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2016-2017 .....	57
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017.....	59
Tabel 8.3	Rumah Tangga Menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017	60
Tabel 8.4	Persentase Rumah Tangga Yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Klungkung,2017.....	61
Tabel 8.5	Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017 .	62
Tabel 8.6	Persentase Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2016-2017 .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2013-2017 .....	2
Gambar 1.2	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Klungkung, 2017.....	3
Gambar 1.3	Sebaran Penduduk Klungkung Menurut Kecamatan (Persen), 2010, 2017, 2020 .....	4
Gambar 1.4	Piramida Penduduk Klungkung, 2017 .....	5
Gambar 1.5	Kepadatan Penduduk Klungkung Menurut Kecamatan (Km), 2010, 2017, 2020 .....	5
Gambar 1.6	Rasio Ketergantungan Klungkung Menurut Kecamatan (Persen), 2010, 2017, 2020 .....	6
Gambar 1.7	Proporsi Penduduk Usia 60+ Tahun di Kabupaten Klungkung (Persen), 2010-2020 ....	7
Gambar 1.8	Usia Perkawinan Pertama Perempuan di Kabupaten Klungkung (Persen), 2015-2017 ....	8
Gambar 2.1	Angka Harapan Hidup Klungkung dan Bali (Tahun), 2010-2017 .....	12
Gambar 2.2	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Pernah Diimunisasi (Persen), 2016-2017 .....	14
Gambar 2.3	Persentase Anak Usia 0-23 Bulan Yang Masih Diberi Asi (Persen), 2016-2017 .....	15
Gambar 2.4	Tingkat Morbiditas Penduduk Klungkung dan Bali (Persen), 2016-2017 .....	16
Gambar 2.5	Persentase Penduduk Klungkung Yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2016-2017 .....	18
Gambar 5.1	Persentase Pengeluaran Per Kapita Klungkung Menurut Jenis Pengeluaran (Persen), 2013-2017 .....	38

Gambar 5.2	Pengeluaran Per Kapita Klungkung Menurut Jenis Pengeluaran (000 Rp), 2013-2017 .....	39
Gambar 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Klungkung, 2012-2017 .....	52
Gambar 7.2	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Di Kabupaten Klungkung, 2012-2017 .....	53

<https://klungkungkab.bps.go.id>





## **MAKLUMAT:**

Selain **Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung 2017** juga diterbitkan **Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung 2017**

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung 2017 hanya menampilkan tabel-tabel pokok hasil SUSENAS 2017

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung 2017 menyajikan analisis lebih lanjut dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung 2017, dilengkapi indikator terkait lainnya dari berbagai sumber

# 5

## Things you must know about KLUNGKUNG POPULATION, 2017



**Jumlah Penduduk**  
(ribu jiwa)  
**177,40**

Terdiri dari 87,70 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 89,70 ribu jiwa penduduk perempuan



**Dependency Ratio**  
**51,10 %**

Setiap 100 orang usia produktif menanggung 52 orang tidak produktif

**Sex Ratio**  
**97,77 %**



Setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki

**Pertumbuhan**  
**0,39 %**



Jumlah penduduk bertambah 0,39% dari tahun 2016



**Kepadatan**  
(Jiwa per km<sup>2</sup>)  
**563,17**

Secara rata-rata tiap 1 km<sup>2</sup> wilayah di Klungkung didiami oleh 563 orang penduduk



# KEPENDUDUKAN

Tujuan akhir pembangunan suatu negara adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Dalam hal ini penduduk tidak hanya diposisikan sebagai subjek namun juga sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi penyediaan sumber daya manusia (SDM) dalam menentukan gerak langkah pembangunan. Namun tentu saja hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitasnya, utamanya dari sisi kesehatan dan pendidikan.

Sebagai objek pembangunan, seluruh program pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari penduduk, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan di bidang kependudukan tidaklah mudah. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya, penduduk bisa menjadi beban dalam pembangunan. Selain kualitas penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk juga sudah menjadi masalah serius yang menjadi konsen pemerintah daerah di Bali khususnya Klungkung. Potensi dan permasalahan kependudukan dapat terlihat dari penggambaran karakteristik penduduk baik dari sisi jumlah, laju, komposisi umur, maupun sebaran antar wilayahnya.

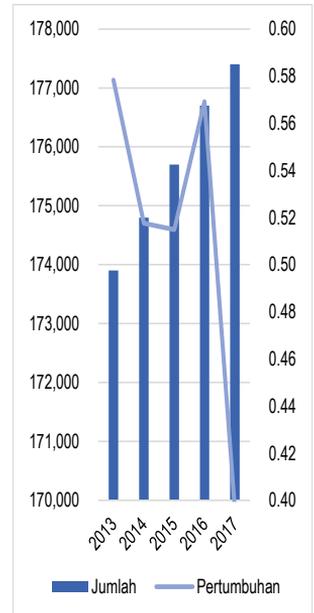
## Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Dari sisi jumlah, penduduk Klungkung tidak begitu besar dibandingkan jumlah total penduduk Bali. Dengan jumlah penduduk sekitar 177 ribu orang di tahun 2017, angka ini tidak lebih dari 5 persen jumlah penduduk Bali yang mencapai 4 juta orang. Sejak Sensus pertama yang diselenggarakan BPS (1961), jumlah penduduk Klungkung sudah bertambah 1,25 kali lipat pada Sensus Penduduk terakhir (2010). Pada awal pelaksanaan sensus penduduk di tahun 1961, jumlah penduduk Klungkung hanya sebesar 139 ribu jiwa. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah, hingga di tahun 2020 nanti jumlah penduduk Klungkung diperkirakan hampir mendekati jumlah dua kali lipatnya (*doubling population*) dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 180 ribu jiwa.

Meskipun tidak bisa dikatakan tumbuh dengan cepat dibanding daerah lainnya di Bali, laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada beberapa dekade terakhir menunjukkan trend peningkatan. Pada periode tahun 1971-1990 laju pertumbuhan penduduk Klungkung sempat melambat, sebagai dampak gencarnya program Keluarga Berencana (KB) kala itu. Bahkan keberhasilan program KB Nasional menjadi model program pengendalian penduduk di beberapa negara khususnya di ASEAN. Memasuki periode tahun 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk mulai meningkat dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun di tahun 2000 mencapai 0,31 persen. Laju pertumbuhan ini terus meningkat hingga pada Sensus Penduduk terakhir di tahun 2010 yang mencapai angka 0,94 persen per tahun dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi dalam 5 dasa warsa terakhir.

Ditinjau dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/*sex ratio* (SR) antara penduduk laki-laki dan perempuan di Klungkung relatif berimbang, meskipun jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibanding penduduk laki-

Gambar 1.1  
Jumlah Penduduk (Jiwa) dan  
Pertumbuhan Penduduk  
(Persen), 2013-2017



Sumber: BPS Kabupaten Klungkung

laki. Pada tahun 2010, 2017, dan proyeksi di tahun 2020, *sex ratio* penduduk Klungkung berada pada kisaran 98. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Klungkung lebih banyak berjenis kelamin perempuan, dengan perbandingan sekitar 98 orang laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

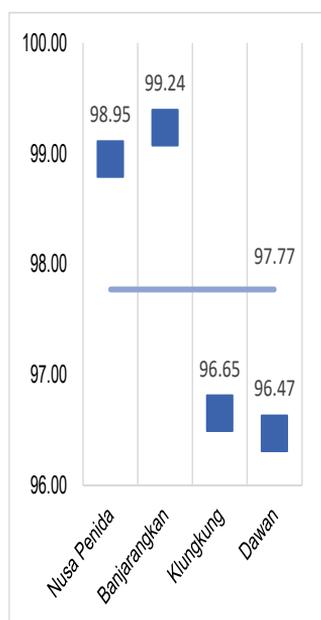
**Tabel 1.1. Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klungkung, 2010-2020 (ribu jiwa)**

Kecamatan	2010			2017			2020		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Nusa Penida	22.50	22.72	45.22	22.64	22.88	45.52	22.73	22.93	45.66
Banjarangkan	18.57	18.68	37.25	19.50	19.65	39.15	19.91	20.00	39.91
Klungkung	27.18	28.17	55.35	28.60	29.59	58.19	29.12	30.17	59.29
Dawan	16.35	16.93	33.28	16.96	17.58	34.54	17.24	17.80	35.04
<b>Jumlah</b>	<b>84.60</b>	<b>86.50</b>	<b>171,10</b>	<b>87.70</b>	<b>89.70</b>	<b>177.40</b>	<b>89.00</b>	<b>90.90</b>	<b>179.90</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Klungkung 2010-2020

Dominasi jumlah penduduk perempuan terhadap laki-laki terlihat pada seluruh kecamatan yang ada di Klungkung. Pada tahun 2010, 2017, dan proyeksi di tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Klungkung dan Dawan tercatat yang terendah, dengan *sex ratio* pada kisaran 96-97. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Nusa Penida dan Banjarangkan yang memiliki rasio jenis kelamin sebesar 99. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk di masing-masing kecamatan yang ada di Klungkung lebih banyak berjenis kelamin perempuan, dengan perbandingan sekitar 96-99 orang laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

**Gambar 1.2**  
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Klungkung, 2017



Sumber: BPS Kabupaten Klungkung

### Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Selain laju pertumbuhan penduduk, yang juga menjadi fokus dalam pengendalian masalah penduduk adalah sebaran dan kepadatan penduduk. Sebaran penduduk relatif lebih dipengaruhi oleh pola migrasi baik migrasi ke luar maupun migrasi masuk. Pola

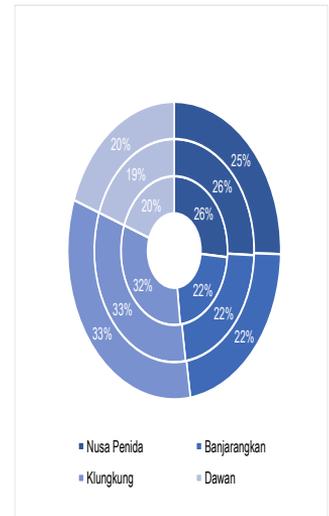
migrasi ini terkait dengan faktor pendorong dari daerah asal migran dan besarnya tarikan dari daerah tujuan migrasi. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Bali, Klungkung tidak hanya memiliki daya tarik obyek wisata dan atraksi budaya. Perkembangan ekonomi Klungkung khususnya di sektor pariwisata, menciptakan cukup banyak lapangan kerja yang juga menarik bagi pencari kerja.

Gambaran piramida penduduk Klungkung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memperlihatkan bagaimana perkembangan penduduk Klungkung lebih dipengaruhi oleh faktor non-alamiah yakni migrasi. Perkembangan piramida penduduk yang cenderung melebar antara tahun 2010 dan 2017, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur, bukan semata diakibatkan oleh pergeseran antar kelompok umur (kohor), namun akibat penambahan dari penduduk luar di masing-masing kelompok umurnya.

Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa penduduk Bali termasuk Klungkung relatif *immobile*, dalam artian ada keengganan penduduk untuk berpindah dari tempat kelahiran ke tempat lain namun dari sebaran penduduk antar kecamatan terlihat adanya ketimpangan. Sebaran penduduk Klungkung cenderung berada pada Kecamatan Klungkung sebagai pusat kota kabupaten. Wilayah yang hanya mencakup sepersepuluh dari total wilayah Klungkung ini dihuni oleh hampir sepertiga penduduk Klungkung (32,80%). Proporsi penduduk di wilayah ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahun.

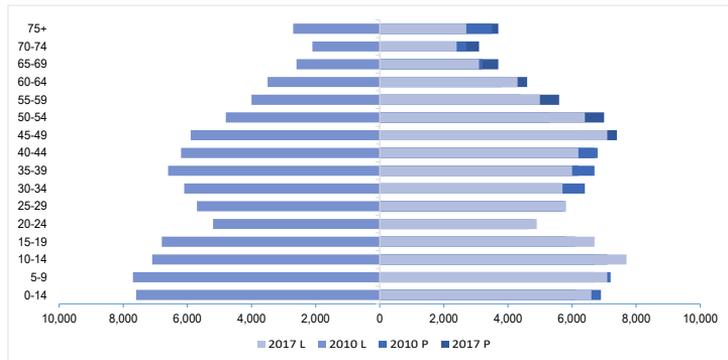
Ketimpangan sebaran penduduk juga dapat dilihat dari kepadatan penduduknya. Klungkung tergolong kabupaten yang cukup padat di Provinsi Bali. Dengan luas yang kurang dari 6 persen dari total luas wilayah Bali, kepadatan penduduk Klungkung di tahun 2017 mencapai 563 jiwa per km<sup>2</sup>. Walaupun terbilang cukup padat, angka ini masih di bawah tingkat kepadatan Provinsi Bali yang sebesar 753 jiwa per km<sup>2</sup>.

Gambar 1.3  
Sebaran Penduduk  
Klungkung Menurut  
Kecamatan (Persen),  
2010, 2017, 2020



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

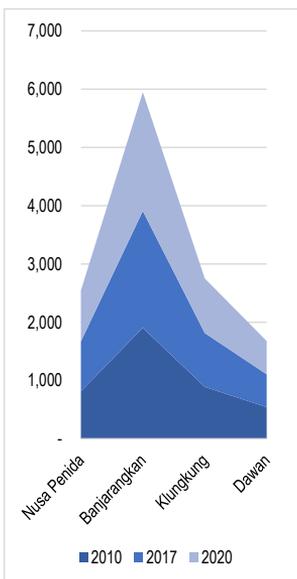
Gambar 1.4  
Piramida Penduduk Klungkung, 2017



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

Jika dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan yang ada, maka Kecamatan Klungkung merupakan kecamatan paling padat dengan kepadatan penduduk mencapai 2.003 jiwa per km<sup>2</sup>. Angka ini hampir mencapai 4 kali lipat kepadatan kabupaten. Sementara itu, kecamatan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Nusa Penida. Pada tahun 2017, kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 224 jiwa per km<sup>2</sup>.

Gambar 1.5  
Kepadatan Penduduk Klungkung Menurut Kecamatan (Km<sup>2</sup>), 2010, 2017, 2020



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

Padatnya penduduk di Kecamatan Klungkung erat kaitannya dengan fungsi sentral dari Kota Semarang, disamping sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat pendidikan maupun kesehatan. Sementara Kecamatan Nusa Penida terutama Pulau Nusa Lembongan merupakan wilayah yang dianggap sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*) khususnya pada industri pariwisata. Saat ini pembangunan di Kecamatan Nusa Penida terus digenjot untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke pulau yang mendapat julukan *The Blue Paradise Island* tersebut.

### Angka Beban Ketergantungan

Rasio antara penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif dikenal dengan angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya

beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Semakin besar penduduk non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, maka semakin besar angka beban ketergantungannya. Secara ekonomi, hal ini juga menggambarkan besarnya beban ekonomi penduduk yang bekerja (produktif) untuk menanggung penduduk yang belum bekerja dan tidak bekerja lagi (non produktif).

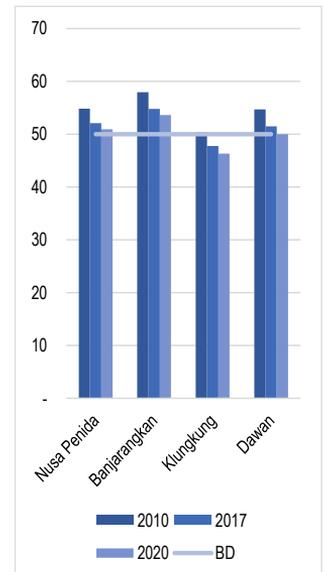
**Tabel 1.2. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Klungkung, 2013-2017**

Uraian	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Rasio Jenis Kelamin (Persen)
2013	173.90	552.06	97.84
2014	174.80	554.92	97.96
2015	175.70	557.78	97.86
2016	176.70	560.95	97.88
2017	177.40	563.17	97.77

Sumber: Proyeksi Penduduk Klungkung 2010-2020

Dari perbandingan komposisi antara penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), penduduk Klungkung tergolong dalam penduduk non produktif karena angka rasio ketergantungannya saat ini masih berada di atas 50. Klungkung baru bisa dikatakan memasuki masa Bonus Demografi (BD) pada tahun 2020, yang secara harfiah berarti komposisi struktur umur penduduk idealnya mampu memberikan keuntungan secara ekonomi akibat besarnya penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja. Untuk bisa berhasil meraih peluang emas yang dikenal dengan *“the windows of opportunity”* ini, tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan lapangan kerja yang mampu menampungnya.

**Gambar 1.6**  
Rasio Ketergantungan Klungkung Menurut Kecamatan (Persen), 2010, 2017, 2020



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

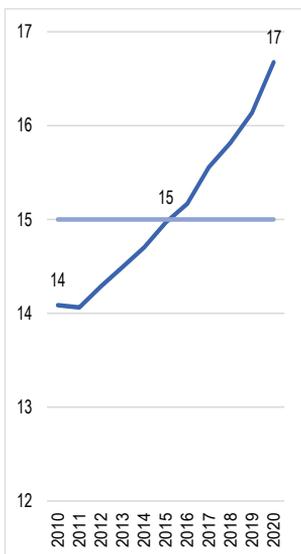
*Ageing population* merupakan isu kependudukan terkini yang terkait pula dengan komposisi penduduk. Secara natural manusia atau penduduk akan bergerak menuju masa ini. Ketika komposisi penduduk berusia 60 tahun ke atas semakin banyak, suatu negara atau wilayah dikatakan mengalami *ageing population*. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya tingkat fertilitas dan tingkat kematian, serta semakin panjangnya usia harapan hidup penduduk. Pada tahun 2017 ini, populasi penduduk Klungkung bisa dikatakan sudah memasuki *ageing population*, bahkan 5 tahun mendatang kondisi ini terus meningkat. Hal ini tentu berdampak pada ketersediaan jaminan hari tua, serta berbagai fasilitas pendukung penduduk bagi kelompok lanjut usia ini.

### Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Tingkat fertilitas tidak terlepas dari usia perkawinan pertama penduduk perempuan. Semakin dini usia perkawinan, semakin panjang rentang masa reproduksi dan semakin besar peluang melahirkan lebih banyak anak. Usia perkawinan pertama juga menjadi indikator kesehatan khususnya bagi perempuan. Perkawinan di usia terlalu muda meningkatkan resiko pada kematian bayi yang dilahirkan. Perkawinan di usia muda memperkecil peluang perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ini terkait dengan kematangan fisik dan mental serta pengetahuan reproduksi bagi perempuan di kala melahirkan dan merawat anak yang dilahirkannya.

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia perkawinan perempuan ini sempat menuai kritik dari berbagai kalangan. Namun demikian dalam undang-undang perlindungan anak, batas usia minimal perempuan untuk menikah ditingkatkan menjadi 18 tahun. Di sisi lain, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terus

Gambar 1.7  
Proporsi Penduduk Usia 60+  
Tahun di Kabupaten  
Klungkung (Persen),  
2010-2020



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

menggalakkan bahwa usia perkawinan ideal perempuan adalah pada saat umur 21 tahun.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sebagian besar wanita di Klungkung menikah pada umur ideal (19-24 tahun) dengan persentase sebesar 54,67 persen di tahun 2017, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 57,90 persen. Mengacu ke Undang-undang perkawinan, proporsi wanita pada perkawinan pertama berumur di atas 16 tahun di tahun 2017 hampir mencapai 100 persen, tepatnya 96,15 persen. Namun demikian masih ditemukan 3,85 persen perempuan menikah pada umur yang sangat belia, antara 10-15 tahun yang mana seharusnya sedang mengenyam pendidikan dasar. Kondisi ini membaik dibanding tahun sebelumnya karena perempuan yang menikah di bawah umur 15 tahun tercatat sebesar 5,22 persen.

**Tabel 1.3. Proporsi Wanita Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

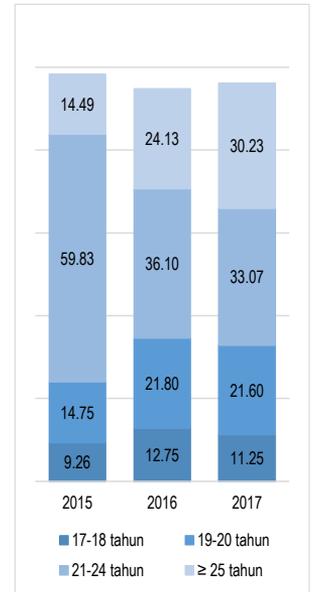
Kelompok Umur	2016	2017
≤ 16 tahun	5.22	3.85
17-18 tahun	12.75	11.25
19-20 tahun	21.80	21.60
21-24 tahun	36.10	33.07
≥ 25 tahun	24.13	30.23

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

### Penggunaan Alat/Cara KB

Penurunan tingkat fertilitas tidak terlepas dari peranan pemerintah melalui program Keluarga Berencana (KB). Melalui program ini, intervensi terhadap faktor pertumbuhan penduduk dilakukan dengan menggalakkan penggunaan alat kontrasepsi atau lebih dikenal dengan alat KB. Dengan berbagai programnya,

**Gambar 1.8**  
Usia Perkawinan Pertama Perempuan Klungkung (Persen), 2015-2017



Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

program KB diharapkan mampu meningkatkan cakupan akseptor KB terutama penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implant, termasuk penggunaan metode kontrasepsi permanen/steril seperti vasektomi dan tubektomi.

Persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin dan sedang menggunakan alat kontrasepsi menurun dari 58,34 persen di tahun 2016 menjadi 54,23 persen di tahun 2017. Hal yang cukup menggembirakan adalah penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang yang masih dominan dan berada di atas 88 persen. Demikian halnya penggunaan metode kontrasepsi permanen, persentase wanita umur 15-49 tahun yang berstatus kawin dan menggunakan metode kontrasepsi ini menunjukkan tren peningkatan walaupun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2016 persentasenya sebesar 10,26 persen, kemudian menurun di tahun 2017 dengan persentase hanya sebesar 5,41 persen.

**Tabel 1.4 Persentase Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Alat/Cara Kontrasepsi	2016	2017
<b>Sterilisasi Wanita/Tubektomi/MOW</b>	7.72	5.41
<b>Sterilisasi Pria/Vasektomi/MOP</b>	2.54	0.00
<b>IUD/AKDR/Spiral</b>	34.65	34.86
<b>Suntikan</b>	36.34	34.51
<b>Susuk KB/Implant</b>	7.67	13.97
<b>Pil</b>	9.61	10.73
<b>Kondom Pria/Karet KB</b>	0.94	0.00
<b>Intravag/Kondom Wanita/Diafragma</b>	0.00	0.00
<b>Metode Menyusui Alami</b>	0.00	0.38
<b>Pantang Berkala/Kalender</b>	0.53	0.14
<b>Lainnya</b>	0.00	0.00

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung



# Tenaga Kesehatan



Klungkung, 2017



449  
TENAGA  
KEPERAWATAN



265  
TENAGA  
KEBIDANAN



57 Orang  
TENAGA MEDIS



48  
TENAGA  
KEFARMASIAN



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

## KESEHATAN DAN GIZI

Sumber daya manusia (SDM) yang besar jika tidak dibarengi dengan kualitas yang sepadan justru akan menjadi beban. Salah satu yang dapat menunjukkan kualitas SDM adalah indikator di bidang kesehatan. Presiden RI pada suatu kesempatan menyampaikan bahwa bangsa yang maju, bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat, jadi tanpa kesehatan jangan harap negara maju. Tingkat kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan mutu pembangunan suatu wilayah. SDM yang sehat akan mampu secara maksimal mendukung proses dan dinamika pembangunan suatu wilayah, khususnya pembangunan ekonominya.

Oleh karena itu, berbagai program terkait peningkatan kesehatan masyarakat terus digalakkan dan disempurnakan. Porsi anggaran kesehatan baik pada APBD maupun APBN pun mengalami peningkatan. Bahkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 10 persen dari APBN menjadi salah satu fokus APBN. Anggaran ini nantinya akan diarahkan dalam bentuk peningkatan status kesehatan dan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk Kabupaten Klungkung, besaran anggaran kesehatan pada APBD (2017) bahkan sudah mencapai 18,19 persen, sesuai dengan amanat undang-undang yang menyatakan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total APBD.

## Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

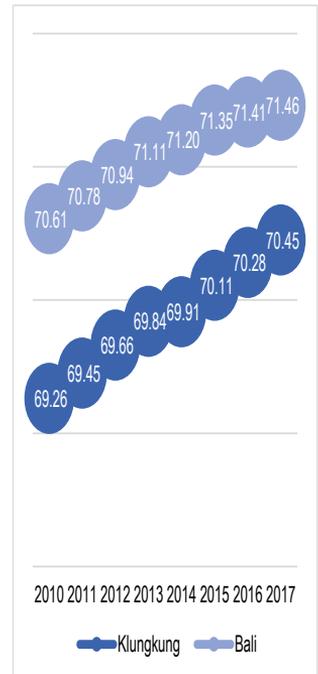
Besarnya porsi anggaran kesehatan jika dimanfaatkan dengan baik tentu akan berdampak pada perbaikan berbagai indikator kesehatan yang ada. Keberhasilan atas berbagai program terkait kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain peningkatan angka harapan hidup (AHH). Berdasarkan komponen pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Indeks Pembangunan Gender (IPG), angka harapan hidup, yang dalam hal ini diukur dari angka harapan hidup saat lahir ( $E_0$ ) tercatat cenderung meningkat setiap tahun.

Angka harapan hidup Klungkung pada tahun 2011 masih berada pada 69 tahun (69,45 tahun). Angka harapan hidup Klungkung terus meningkat hingga di tahun 2017 sudah di atas 70 tahun (70,45 tahun). Jika dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, penduduk perempuan memiliki harapan hidup yang lebih lama. Sejak tahun 2011 angka harapan hidup penduduk perempuan Klungkung sudah di atas 70 tahun yaitu 71,29 tahun di tahun 2011, kemudian menjadi 72,35 tahun di tahun 2017. Sementara angka harapan hidup penduduk laki-laki masih di bawah angka 70 tahun yaitu 67,51 tahun di tahun 2011, kemudian menjadi 68,42 tahun di tahun 2017. Dibandingkan dengan kondisi Bali, AHH Klungkung masih lebih rendah dibanding angka provinsi.

## Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Tingkat kesehatan penduduk terkait erat dengan tingkat kesehatan balitanya. Selain dari tingkat kematian bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR), tingkat kesehatan balita setidaknya dapat diukur dari tingkat imunitas dan kualitas gizi balita. Tingkat imunitas diukur dari persentase anak usia 0-59 bulan yang pernah diimunisasi menurut jenis imunisasi. Sementara status gizi balita didekati dengan persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah dan atau masih diberi ASI. Indikator yang disampaikan bersumber dari data

Gambar 2.1  
Angka Harapan Hidup Klungkung  
dan Bali (Tahun), 2010-2017



Sumber: IPM Klungkung 2017

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Imunisasi menjadi salah satu indikator kesehatan mengingat imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti bodi untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Dengan imunisasi diharapkan tingkat kematian bayi menurun dan meningkatkan peluang hidup (harapan hidup) bagi bayi yang dilahirkan.

**Tabel 2.1 Persentase Anak Usia 0-59 bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Jenis Imunisasi	2016	2017
BCG	99.23	99.54
DPT	92.40	92.83
Polio	100.00	98.18
Hepatitis B	91.68	94.12
Campak (MMR)	79.13	76.12

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Berdasarkan data yang tersedia, sebagian besar bayi telah mendapatkan 5 imunisasi yang diwajibkan pemerintah (imunisasi wajib), antara lain BCG (*Bacille Calmette-Guérin*), DPT (*Diphtheria, Tetanus, Pertussis*), Polio, Hepatitis B, dan Campak (MMR). Terlihat bahwa perbandingan data antara tahun 2016 dan 2017 persentase bayi yang mendapat imunisasi tersebut cenderung meningkat. Jika di tahun 2016 persentase anak umur di bawah 5 tahun (0-59 bulan) yang mendapatkan imunisasi wajib di atas 90 persen (kecuali imunisasi Campak hanya 79,13 persen). Kondisi ini meningkat di tahun 2017 pada seluruh jenis imunisasi menjadi di atas 90 persen (kecuali imunisasi Campak yang sebesar 76,12 persen).

Meskipun persentasenya meningkat pada tahun 2017,

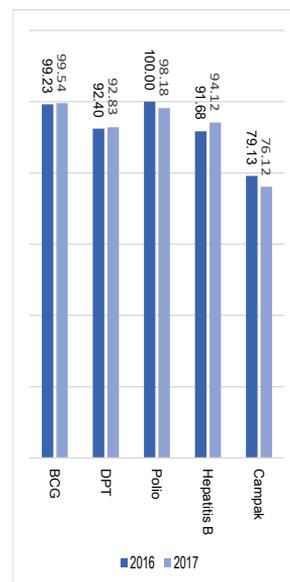
namun Klungkung masih belum bisa memenuhi target nasional dalam pencapaian imunisasi dasar lengkap (IDL) yang ditetapkan yakni 93 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar balita di Klungkung mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai dengan target nasional. Hal yang cukup menggembirakan adalah di tahun 2017 balita yang mendapat imunisasi Polio mencapai 98,18 persen. Hal ini tidak terlepas dari penyelenggaraan Program Imunisasi Nasional (PIN), selain itu pemerintah pusat juga telah mencanangkan gerakan nasional Indonesia Bebas Polio.

Di sisi lain, pemberian imunisasi Campak dan Hepatitis B tercatat relatif masih rendah. Hal ini terlihat dari persentase imunisasi Hepatitis B yang masih di bawah 90 persen di tahun 2015, walaupun pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang lumayan tinggi. Bahkan pada imunisasi Campak (MMR) persentasenya tercatat masih di bawah 80 persen. Padahal imunisasi ini termasuk dalam imunisasi dasar dalam target nasional.

Asupan gizi untuk balita juga menjadi salah satu indikator kesehatan khususnya untuk ibu dan balita. Hal ini dapat diukur dari persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui. Berdasarkan data yang tersedia hingga tahun 2017, persentase anak pada umur tersebut yang pernah disusui cenderung meningkat. Pada tahun 2016 persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah mendapat ASI (air susu ibu) atau disusui sebesar 91,59 persen, kemudian naik menjadi 96,89 persen pada tahun 2017.

Tidak saja dari sisi pernah atau tidaknya anak disusui, lamanya menyusui juga dapat menjadi indikator kesehatan balita. Pemberian ASI kepada balita menjadi hal yang dianjurkan karena ASI dinilai mampu menyediakan gizi yang lengkap, mudah dicerna dan efisien digunakan, serta dapat melindungi anak dari infeksi. Bagi sang ibu, menyusui juga membantu menunda/menjarangkan kehamilan, melindungi kesehatan ibu, dan dari sisi harga tentu tidak bisa dibandingkan dengan susu formula.

Gambar 2.2  
Persentase Anak Usia 0-59  
Bulan Yang Pernah  
Diimunisasi (Persen),  
2016-2017



Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

**Tabel 2.2 Persentase Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun Yang Pernah Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Jenis Kelamin	2016	2017
Laki-laki	94.65	95.74
Perempuan	84.00	98.07
Laki-laki + Perempuan	91.59	96.89

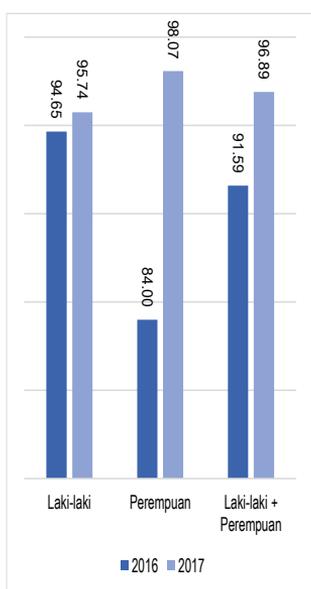
Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Meskipun pemberian ASI eksklusif dilakukan mulai usia bayi 0-6 bulan, namun idealnya pemberian ASI dilakukan hingga anak berusia 2 tahun, yang diimbangi dengan asupan makanan tambahan. Pemberian ASI terhadap bayi hingga berusia 2 tahun ini ditengarai akan memberikan dampak positif pada perkembangan bayi. Kiranya hal ini dapat merefleksikan derajat kesehatan bayi di suatu daerah. Pada tahun 2017 persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang masih diberi ASI tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi sebesar 87,53 persen.

Disamping tingkat imunitas dan gizi balita, penolong pertama dalam proses persalinan menjadi kunci pada rendahnya tingkat kematian ibu pasca melahirkan, serta meningkatkan peluang bayi lahir dengan selamat. Salah satu yang bisa dikatakan sebagai faktor penyebab rendahnya tingkat kematian bayi di Klungkung adalah peningkatan kualitas pada proses persalinan.

Sebagian besar proses persalinan di Klungkung dilakukan oleh tenaga medis. Bahkan sejak tahun 2015, penolong kelahiran oleh tenaga medis sudah mencapai 100. Jika ditinjau secara rinci menurut tenaga medis, pada tahun 2017 persentase penolong kelahiran sebagian besar ditolong oleh bidan yaitu sebesar 56,87 persen. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 61,22 persen. Penolong kelahiran selanjutnya adalah dokter kandungan yang sebesar 38,39 persen. Kemudian disusul oleh dokter umum sebesar 4,74 persen.

Gambar 2.3  
Persentase Anak Usia 0-23 Bulan Yang Masih Diberi ASI (Persen), 2016-2017



Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

**Tabel 2.3 Persentase Persalinan Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Penolong Persalinan Terakhir	2016	2017
Dokter Kandungan	37.19	38.39
Dokter Umum	1.59	4.74
Bidan	61.22	56.87

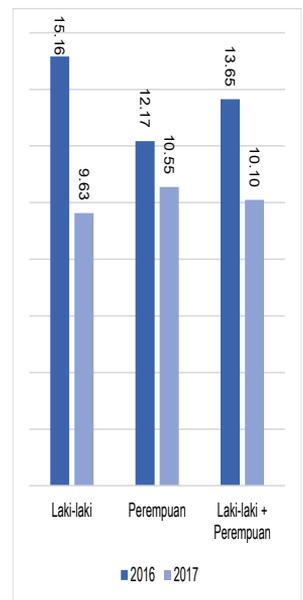
Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

### Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi hal yang wajib dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Apalagi jika melihat tingkat kesakitan penduduk Klungkung yang sudah cukup rendah. Tingkat kesakitan atau morbiditas dihitung dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan (sakit) hingga terganggunya aktivitas. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Berdasarkan data Susenas 2017, kurang dari seperlima penduduk Klungkung mengalami keluhan kesehatan. Tingkat morbiditas penduduk Klungkung cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 tingkat morbiditas penduduk Klungkung hanya sebesar 10,10 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 13,65 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, tingkat morbiditas penduduk laki-laki cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Tingkat morbiditas penduduk laki-laki hanya sebesar 9,63 persen di tahun 2017, sementara penduduk perempuan sebesar 10,55 persen.

Gambar 2.4  
Tingkat Morbiditas Penduduk Klungkung dan Bali (Persen), 2016-2017



Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Lama keluhan kesehatan (sakit) berdampak pada berkurangnya hari produktif bagi penduduk yang mengalaminya, karena lamanya keluhan kesehatan akan berpengaruh pada terganggunya kemampuan penduduk untuk beraktifitas sehari-hari secara normal. Sebagian besar penduduk mengalami keluhan kesehatan selama kurang dari 4 hari. Proporsinya tercatat sebesar 65,11 persen secara keseluruhan. Sementara jika dirinci menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki sebesar 70,26 persen dan penduduk perempuan sebesar 60,52 persen.

**Tabel 2.4 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Menurut Lama Keluhan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Lama Keluhan (Hari)	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
≤ 3	63.03	70.26	66.32	60.52	64.51	65.11
4-7	24.01	11.82	26.04	27.31	24.93	20.00
8-14	4.64	6.06	4.38	4.99	4.53	5.49
15-21	2.01	0.88	1.79	1.95	1.91	1.45
22-30	6.31	10.98	1.47	5.24	4.13	7.95

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Meskipun mengalami keluhan kesehatan nampaknya tidak semua penduduk serta merta berobat pada fasilitas kesehatan maupun tempat berobat lainnya. Hal ini terlihat dari persentase jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan berobat jalan yang berkisar di bawah 75 persen. Pada tahun 2016 persentasenya mencapai 70,75 persen, kemudian menurun menjadi 51,00 persen di tahun 2017. Kecenderungan untuk berobat jalan tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi penduduk namun juga tidak terlepas dari akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan termasuk ketersediaan jaminan kesehatan yang belakangan makin

ditingkatkan seperti JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang disediakan pusat maupun JKN Daerah.

Terdapat perbedaan persentase penduduk yang berobat jalan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang berobat jalan jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang berobat jalan pada tahun 2017 sebesar 51,43 persen, sementara penduduk perempuan hanya sebesar 50,62 persen.

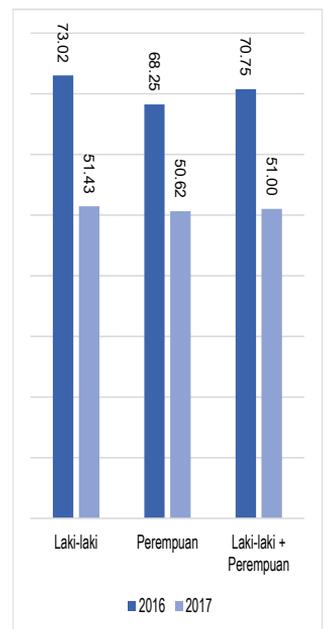
Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak berobat jalan sebagian besar alasannya adalah karena mengobati sendiri. Secara keseluruhan poporsinya mencapai 49,43 persen. Sebesar 35,03 persen merasa keluhan kesehatannya tidak perlu berobat jalan. Tidak ada penduduk yang tidak berobat jalan karena alasan tidak memiliki biaya, baik biaya untuk berobat maupun biaya transportasi.

Praktek dokter/klinik menjadi tempat tujuan yang paling umum dari penduduk yang berobat jalan. Di tahun 2017, penduduk yang berobat jalan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan ini mencapai 57,04 persen. Capaian ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, saat itu fasilitas kesehatan ini dimanfaatkan oleh 62,71 persen penduduk yang berobat jalan. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya pelayanan RS Pemerintah dan Puskesmas yang memfasilitasi JKN.

Sebagai fasilitas kesehatan pertama, puskesmas juga menjadi pilihan bagi penduduk yang berobat jalan. Di tahun 2017 persentasenya mencapai 24,93 persen dari penduduk yang berobat jalan. Sementara rumah sakit yang menjadi rujukan untuk pelayanan kesehatan lanjutan, persentase penduduk yang memilih tempat ini untuk berobat jalan mencapai 18,75 persen.

Meskipun tidak terlalu banyak (kurang dari 4 persen), pengobatan tradisional masih menjadi alternatif pengobatan bagi penduduk Klungkung. Di tahun 2017 persentase penduduk yang

Gambar 2.5  
Persentase Penduduk  
Klungkung Yang Berobat  
Jalan Menurut Jenis Kelamin  
(Persen), 2016-2017



Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

berobat jalan dan memilih pengobatan tradisional sebagai tempat berobat sebesar 3,56 persen. Kecenderungan penduduk perempuan untuk memanfaatkan pengobatan tradisional sebagai tempat berobat cenderung lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki.

**Tabel 2.5 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan dan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2016-2017**

Tempat Berobat	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
RS Pemerintah	10.06	12.43	3.96	16.43	7.26	14.52
RS Swasta	4.53	3.03	3.92	5.32	4.25	4.23
Praktek Dokter/Bidan	62.54	52.23	59.02	55.13	60.92	53.75
Klinik/Praktek Dokter Bersama	1.78	4.04	1.82	2.61	1.79	3.29
Puskesmas/Pustu	31.49	30.37	37.06	19.97	34.04	24.93
UKBM	0.00	0.90	0.77	2.51	0.35	1.74
Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif	2.23	2.53	2.98	4.50	2.57	3.56
Lainnya	1.61	0.00	3.26	0.73	2.37	0.38

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Pilihan tempat berobat antara fasilitas medis dan non medis tidak semata-mata disebabkan oleh faktor preferensi saja, namun juga dari ketersediaan dan penyebaran tenaga medis. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, jumlah puskesmas di Klungkung tahun 2017 sebanyak 9 unit puskesmas dan 59 polindes. Sementara jumlah paramedis (tenaga medis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya) meningkat dari 1.075 orang di tahun 2016 menjadi 1.216 orang di tahun 2017. Jumlah dokter (dokter spesialis, umum, dan gigi) yang tersedia meningkat dari 157 orang di tahun 2016 menjadi 197 orang pada tahun 2017.



# APM VS APK



## Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

## Angka Partisipasi Kasar (APK)

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, termasuk kelompok pendidikan non formal.

### Definisi

96,60



105,05

91,62



105,11

71,79



82,91

# PENDIDIKAN

## Angka Melek Huruf (AMH)

Melek huruf adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Menurut definisi UNESCO, melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengomunikasikan, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat menunjukkan perkembangan intelektual suatu wilayah, selain itu angka melek huruf juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Selama periode waktu lima tahun terakhir, secara umum AMH Klungkung cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2013 AMH Klungkung sebesar 84,47 persen, kemudian sedikit meningkat menjadi 85,84 persen di tahun 2017. Kecenderungan fluktuasi ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Selama rentang waktu lima tahun tersebut, AMH laki-laki berkisar pada angka 90 persen, yaitu dari 92,35 persen menjadi 90,65 persen. Sementara itu, AMH penduduk perempuan juga sedikit berfluktuasi dengan tren yang menunjukkan peningkatan, yaitu dari 76,81 persen menjadi 81,27 persen.

Berdasarkan kelompok umur, AMH pada kelompok umur 65 tahun ke atas, akselerasinya lebih terlihat dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada kelompok umur tersebut AMH masih berkisar dibawah 60 persen. Dengan kata lain, persentase penduduk yang belum mampu baca tulis masih cukup banyak. Hal ini kiranya akan

sulit ditingkatkan mengingat penduduk pada kelompok ini tergolong penduduk yang tidak produktif dengan pendidikan yang cenderung rendah. Sementara pada kelompok umur lainnya, persentase penduduk yang buta huruf sudah semakin sedikit, terutama pada kelompok umur 15-24 tahun.

Ketimpangan AMH antara penduduk laki-laki dan perempuan terlihat pada AMH kelompok umur 65 tahun ke atas. Kondisi ini tentu tidak bisa dihindari mengingat pada zaman penduduk kelompok ini mengenyam pendidikan dasar, kondisi dunia pendidikan mungkin jauh berbeda. AMH penduduk laki-laki pada kelompok umur ini tercatat sebesar 66,77 persen, sementara AMH penduduk perempuan hanya mencapai 40.58 persen.

**Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>15 tahun ke atas</b>	92.13	90.65	79.71	81.27	85.82	85.84
<b>15-24 tahun</b>	98.79	100.00	96.45	100.00	97.70	100.00
<b>65 tahun ke atas</b>	80.86	66.77	54.04	40.58	66.40	52.17

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

### Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) adalah banyaknya tahun belajar yang diselesaikan dalam pendidikan formal dan tidak termasuk tahun yang mengulang. Dalam hal ini, usia penduduk yang diukur adalah penduduk yang berumur 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klungkung selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah mencapai 6,88 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya rata-rata ini mengalami peningkatan hingga mencapai 7,46 tahun pada tahun 2017.

Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal yang wajar, mengingat tidak semua penduduk perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan layaknya laki-laki. Dalam hal ini, kemungkinan pada rentang usia tersebut, kaum perempuan harus menikah dan mengurus rumah tangga, sehingga tidak sempat lagi melanjutkan pendidikan. Namun demikian, dari tahun ke tahun rata-rata lama sekolah perempuan tetap mengalami tren peningkatan.

### **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, meningkatnya tingkat pendidikan penduduk dapat menjadi gambaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Tingkat pendidikan dapat dilihat dari ijazah terakhir yang dimiliki. Sepertiga lebih penduduk berumur 15 tahun ke atas telah berijazah setingkat SLTA ke atas. Pada tahun 2017 persentasenya mencapai 37,89 persen. Meskipun demikian, persentase penduduk yang berpendidikan setingkat SD masih cukup tinggi, dengan persentase mencapai 31,61 persen pada tahun 2016 dan 19,30 persen pada tahun 2017. Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah juga cukup tinggi yaitu mencapai 26,72 persen di tahun 2017.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk laki-laki yang tidak memiliki ijazah lebih rendah dibanding penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang tidak memiliki ijazah hanya sebesar 20,25 persen. Demikian halnya jika dilihat lebih jauh menurut jenjang pendidikan. Hanya persentase penduduk

perempuan dengan ijazah setingkat SD dan SLTP yang lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Hal ini kiranya bisa menjadi gambaran bahwa peluang perempuan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi cenderung lebih rendah dibanding laki-laki. Pada tingkat pendidikan S1 ke atas misalnya, persentase laki-laki yang memiliki ijazah pada tingkat pendidikan ini mencapai 8,39 persen. Sementara persentase untuk perempuan hanya sebesar 5,59 persen.

**Tabel 3.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Ijazah Yang Dimiliki	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Tidak Mempunyai Ijazah</b>	22.62	20.25	37.23	32.87	30.04	26.72
<b>SD Sederajat</b>	31.09	18.65	32.10	19.92	31.61	19.30
<b>SLTP Sederajat</b>	7.39	14.99	5.29	17.14	6.32	16.09
<b>SLTA Sederajat</b>	28.52	34.55	18.85	22.03	23.62	28.14
<b>DI/DII/DIII</b>	2.95	3.16	1.89	2.45	2.41	2.80
<b>Diploma IV/S1/S2/S3</b>	7.42	8.39	4.63	5.59	6.01	6.95

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

### **Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan beberapa indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sudut pandang berbeda juga dapat diartikan sebagai kemampuan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Berdasarkan data tahun 2013 hingga 2017, APS Kabupaten Klungkung untuk penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai lebih dari 96 persen, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia tersebut telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Sementara pada kelompok usia

lainnya, APS berangsur menurun. Namun secara umum, sebagian besar penduduk usia sekolah sudah dapat menikmati fasilitas pendidikan.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum APS penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi hampir pada semua jenjang kelompok umur. Tercatat di tahun 2017 pada kelompok umur 7-12 tahun, APS penduduk perempuan mencapai 99,54 persen, sedangkan APS penduduk laki-laki hanya sebesar 97,82 persen. Begitu juga pada kelompok umur 19-24 tahun, APS penduduk perempuan mencapai 26,40 persen, namun APS penduduk laki-laki hanya sebesar 13,40 persen.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
7-12 tahun	96.48	97.82	100.00	99.54	98.45	98.68
13-15 tahun	97.80	97.27	96.64	97.97	97.28	97.56
16-18 tahun	81.28	89.18	75.23	83.71	78.96	86.51
19-24 tahun	22.60	13.40	14.46	26.40	18.26	19.64

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Jika pada APS tidak memperhatikan jenjang pendidikan sesuai kelompok umur, maka pada APM jenjang pendidikan sesuai kelompok umur digunakan sebagai dasar penghitungan. Dengan cara penghitungan tersebut, maka APM dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dan juga proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya.

Sejalan dengan APS, angka APM juga menunjukkan perkembangan yang hampir sama selama lima tahun terakhir. Pada

masing-masing jenjang pendidikan, nilai APM menunjukkan tren meningkat pada setiap tahunnya. Selain itu, pola yang sama juga terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, yang memperlihatkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka besaran APM semakin rendah juga masih terjadi.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum APM penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, terlihat APM penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada jenjang pendidikan SMP, APM penduduk perempuan mencapai 96,36 persen, sementara itu APM penduduk laki-laki hanya 88,21 persen. Kemudian pada jenjang pendidikan SMA, APM penduduk perempuan mencapai 77,26 persen, sedangkan APM penduduk laki-laki hanya 66,57 persen.

**Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>SD sederajat</b>	93.28	96.23	96.94	96.96	95.33	96.60
<b>SMP sederajat</b>	94.20	88.21	93.55	96.36	93.91	91.62
<b>SMA sederajat</b>	74.30	66.57	66.12	77.26	71.16	71.79

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

### Kualitas Pelayanan Pendidikan

Untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan, salah satu indikator yang digunakan adalah rasio antara jumlah murid dengan guru. Semakin kecil nilai rasio ini, menandakan bahwa semakin memadainya pelayanan pendidikan dari sisi rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat merata atau tidaknya jumlah tenaga pengajar pada suatu daerah.

Rasio murid guru di tingkat SD atau sederajat pada tahun ajaran 2015/2016 adalah seorang guru rata-rata mengajar sebanyak 12 orang siswa. Rasio ini mengalami peningkatan hingga pada tahun ajaran 2016/2017 menjadi sebesar 13 orang siswa. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat yang rasio murid gurunya tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan selama periode tahun ajaran 2015/2016 dan periode tahun ajaran 2016/2017 yaitu tetap sebesar 13 orang siswa.

Sama halnya dengan kondisi jenjang pendidikan SMP atau sederajat, jenjang pendidikan SMA atau sederajat rasio murid gurunya juga tidak mengalami baik peningkatan maupun penurunan pada periode tahun ajaran 2015/2016 dan tahun ajaran 2016/2017. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

**Tabel 3.5 Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klungkung, Tahun Ajaran 2013/2014-2016/2017**

Tahun Ajaran	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Guru
	SD	SMP	SMA
2013/2014	12	12	12
2014/2015	14	15	23
2015/2016	12	13	15
2016/2017	13	13	15

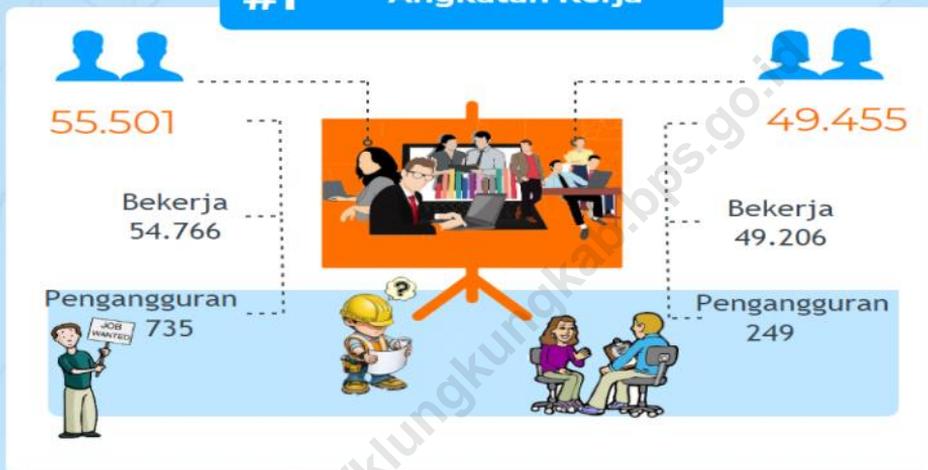
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung



# KETENAGAKERJAAN

Klungkung, 2017

## #1 Angkatan Kerja



## #2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

**77,07%**



83,57%



70,88%

## #3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

**0,94%**

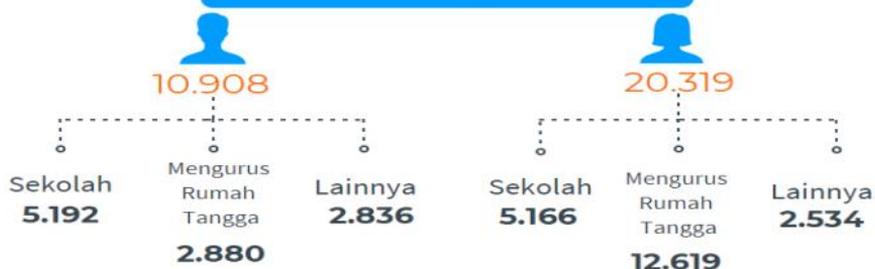


1,32%



0,50%

## #4 Bukan Angkatan Kerja



# KETENAGAKERJAAN

## Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, yang tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

**Tabel 4.1 TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2014-2015&2017**

Jenis Kelamin	TPAK			TPT		
	2014	2015	2017	2014	2015	2017
Laki-laki	83.45	84.73	83.57	2.00	1.13	1.32
Perempuan	72.18	73.54	70.88	1.88	1.68	0.50
Laki-laki + Perempuan	77.67	78.99	77.07	1.94	1.39	0.94

Sumber: Sakemas, BPS Kabupaten Klungkung

TPAK Klungkung selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2014 TPAK Klungkung sebesar 77,67 persen, yang memiliki arti bahwa sebanyak 77,67 persen dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) aktif secara ekonomi atau tersedia untuk kegiatan produksi. Sementara sisanya bukan merupakan angkatan kerja, yang dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya. Memasuki tahun 2015, TPAK Klungkung meningkat menjadi

sebesar 78,99 persen, tetapi pada tahun 2017 TPAK mengalami penurunan menjadi sebesar 77,07 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, selama periode tahun 2014-2015&2017, TPAK laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki selama periode tersebut berada pada kisaran 83-84 persen, sedangkan TPAK penduduk perempuan berada jauh dibawahnya, yaitu berkisar 70-74 persen. Lebih rendahnya TPAK perempuan ini dinilai wajar, mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga, apalagi setelah menikah kebanyakan perempuan akan mengurus rumah tangga. Namun demikian, jika dilihat tren selama tiga tahun terakhir, TPAK perempuan mengalami peningkatan meskipun masih relatif rendah.

Dari TPAK kita dapat mengetahui gambaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Namun untuk melihat seberapa banyak angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh lapangan usaha yang tersedia, dapat dilihat melalui indikator TPT. Angka TPT Klungkung selama kurun waktu tahun 2014-2015&2017 mengalami tren menurun. TPT Klungkung turun dari sebesar 1,39 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,94 persen pada tahun 2017. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT penduduk laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan TPT penduduk perempuan kecuali pada tahun 2015 TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan TPT perempuan.

### **TPAK dan Tingkat Pendidikan**

TPAK yang dirinci menurut pendidikan, dapat memberikan gambaran bagaimana gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi pada masing-masing jenjang pendidikan. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi peluangnya untuk terlibat

dalam angkatan kerja.

TPAK selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula peluangnya untuk terlibat dalam angkatan kerja. Setidaknya, hal tersebut tergambar dari data selama tiga tahun terakhir. TPAK pada jenjang SMA ke atas menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi, berada pada kisaran 80-100 persen. TPAK tertinggi pada kelompok pendidikan tersebut sendiri terjadi pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III yang mencapai 100 persen pada tahun 2017.

**Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klungkung (Persen), 2014-2015&2017**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2014	2015	2017
<= SD	77.28	77.85	77.29
SMP	59.66	59.68	56.78
SMA Umum	89.57	84.77	83.87
SMA Kejuruan	82.04	95.58	80.25
Diploma I/II/III	72.51	85.49	100.00
Universitas	93.18	88.72	96.47
<b>Jumlah</b>	<b>77.67</b>	<b>78.99</b>	<b>77.07</b>

Sumber: Sakernas, BPS Kabupaten Klungkung

Di sisi lain, TPAK pada kelompok pendidikan SMP ke bawah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan lainnya yaitu hanya berkisar di bawah 80 persen. TPAK terendah terjadi pada tingkat pendidikan SMP yang hanya sebesar 59,68 persen pada tahun 2015. Namun bila dilihat pada data terakhir di tahun 2017, TPAK terendah masih terjadi pada tingkat pendidikan SMP dengan capaian hanya sebesar 56,78 persen.

## Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Dari indikator ini, kita dapat melihat persebaran penyerapan tenaga kerja, selain itu dapat dilihat juga kemampuan daya serap terhadap pada masing-masing lapangan usaha. Lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi menjadi lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, kemudian diikuti oleh lapangan usaha pertanian.

Hal ini cukup menarik, mengingat di tengah gempuran perkembangan pariwisata dan era industrialisasi, lapangan usaha pertanian masih sanggup menjadi penopang ekonomi Klungkung.

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Persen), 2014-2015&2017**

Lapangan Usaha	2014			2015			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	23.53	22.01	22.80	31.34	33.46	32.34	19.31	20.13	19.70
Pertambangan dan Penggalan	0.84	2.15	1.47	0.42	0.72	0.56	0.73	0.28	0.52
Industri	10.40	22.73	16.27	8.74	11.33	9.98	10.16	23.44	16.45
Listrik, Gas dan Air Minum	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.23	0.47	0.24	0.36
Konstruksi	15.34	2.31	9.13	10.84	0.68	6.01	16.92	1.67	9.70
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	19.98	31.63	25.53	22.39	34.30	28.05	23.23	39.02	30.70
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4.08	0.00	2.13	3.15	0.00	1.65	8.64	0.53	4.80
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	3.41	1.54	2.52	1.99	2.12	2.05	3.57	2.10	2.87
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	22.43	17.62	20.14	20.69	17.40	19.13	16.96	12.58	14.89

Sumber: Sakernas, BPS Kabupaten Klungkung

Sebanyak 32,34 persen tenaga kerja mampu diserap lapangan

usaha ini pada tahun 2015. Seiring dengan pergeseran sektor ekonomi membuat jumlah ini semakin menurun. Sampai dengan tahun 2017, jumlah tenaga kerja yang diserap lapangan usaha pertanian hanya sebesar 19,70 persen.

Sementara jika ditinjau menurut status pekerjaan, secara umum pilihan masyarakat untuk menjadi buruh/karyawan masih memiliki persentase tertinggi, yaitu sekitar 33-39 persen selama kurun waktu tahun 2014-2017. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 4.4 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2014-2015&2017**

Status Pekerjaan	2014			2015			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Berusaha Sendiri	10.97	22.96	16.68	15.49	12.67	14.15	17.03	28.95	22.67
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	22.83	13.43	18.35	26.10	12.95	19.84	13.57	15.98	14.71
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	1.66	1.46	1.57	2.91	3.11	3.01	1.70	2.00	1.84
Buruh/Karyawan/Pegawai	47.27	29.90	39.00	37.72	29.44	33.78	45.30	27.72	36.98
Pekerja Bebas Di Pertanian	0.72	0.88	0.79	0.22	1.37	0.77	1.28	1.56	1.41
Pekerja Bebas Non Pertanian	10.51	2.06	6.48	8.97	2.94	6.10	10.56	1.67	6.35
Pekerja Keluarga	6.04	29.31	17.13	8.60	37.52	22.36	10.54	22.12	16.02

Sumber: Sakemas, BPS Kabupaten Klungkung

juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu dominan sebagai buruh/karyawan. Pilihan kedua terbanyak sepanjang tahun 2014-2015 adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap dengan persentase 18-20 persen, tetapi pada tahun 2017 pilihan kedua tidak lagi pada berusaha dibantu buruh tidak tetap tetapi beralih menjadi berusaha sendiri dengan persentase sebesar 22,67 persen.

Diantara semua pilihan status pekerjaan tersebut, yang

menarik adalah pilihan untuk menjadi pekerja tak dibayar. Dibandingkan penduduk laki-laki, kaum perempuan yang bekerja jauh lebih banyak memiliki status ini. Secara rata-rata jumlahnya mencapai hampir 2 kali lipat pekerja laki-laki. Kemungkinan besar, pilihan ini dipilih karena cenderung lebih fleksibel dan tidak terikat jam kerja sehingga pekerja perempuan jauh lebih banyak yang termasuk pada status ini.

### **Jumlah Jam Kerja**

Berdasarkan jam kerja, penduduk bekerja dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yakni sementara tidak bekerja, setengah pengangguran, dan pekerja penuh. Yang dimaksud sementara tidak bekerja adalah pekerja yang memiliki pekerjaan, namun selama seminggu terakhir sedang tidak bekerja. Sementara yang dikategorikan sebagai setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu, namun memiliki jumlah jam kerja kurang dari 35 jam. Kemudian yang dimaksud pekerja penuh adalah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu dan memiliki jumlah jam kerja 35 jam atau lebih.

Dibandingkan dengan kondisi dua tahun sebelumnya, jumlah pekerja penuh pada tahun 2015 merupakan yang tertinggi hingga mencapai 76,68 persen. Di sisi lain, jumlah setengah pengangguran menjadi yang terendah selama tiga terakhir, yaitu sebesar 20,88 persen. Sementara untuk jumlah setengah pengangguran yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai lebih dari 26 persen.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, komposisi penduduk laki-laki yang bekerja penuh jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Selama periode tersebut, pekerja penuh penduduk laki-laki jumlahnya berkisar antara 71-80 persen, sedangkan pekerja perempuan hanya berkisar antara 61-72 persen.

Pada setengah pengangguran menurut jenis kelamin, pekerja perempuan jumlahnya jauh mendominasi dibandingkan pekerja laki-laki. Perbedaan yang sangat mencolok terjadi pada tahun 2014, keberadaan jumlah setengah pengangguran perempuan jumlahnya hampir mencapai 2 kali lipat setengah pengangguran laki-laki. Tingginya komposisi setengah pengangguran perempuan ini kemungkinan besar terkait dengan kurang fleksibelnya jam kerja pekerja perempuan, sehingga lebih memilih pekerjaan yang tidak terikat jam kerja.

**Tabel 4.5 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2014-2015 & 2017**

Lapangan Usaha	2014			2015			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
<b>Sementara Tidak Bekerja</b>	3.23	4.57	3.87	1.81	3.13	2.44	0.84	0.28	0.58
<b>Setengah Pengangguran</b>	20.15	33.76	26.63	17.76	24.32	20.88	27.32	31.96	29.51
<b>Pekerja Penuh</b>	76.62	61.67	69.49	80.43	72.55	76.68	71.84	67.76	69.91

Sumber: Sakernas, BPS Kabupaten Klungkung

# The Evolution of the RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA SEBULAN KLUNGKUNG



## TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi adalah susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan pola konsumsi disebabkan oleh pendapatan; tingkat pendidikan/pengetahuan; kondisi tempat tinggal; jenis pekerjaan; tingkat peradaban bangsa; kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat; tinggi rendahnya harga barang dan jasa; selera yang sedang berkembang di masyarakat. Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Dengan menggunakan data pengeluaran dapat diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga.

### **Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran rumah tangga meliputi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dalam periode tahun 2013-2017, pengeluaran rumah tangga di Klungkung mengalami pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran bukan makanan ke pengeluaran makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya tinggi, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan umumnya rendah.

Pada tahun 2017, secara umum tingkat konsumsi yang tergambar dalam konsumsi per kapita penduduk mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi per kapita terjadi baik pada konsumsi makanan maupun bukan makanan. Meskipun sama-sama mengalami peningkatan,

namun dilihat dari komposisinya, pengeluaran/konsumsi bukan makanan menunjukkan trend berfluktuasi dan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir.

Jika di tahun 2013 komposisi pengeluaran bukan makanan mempunyai porsi sebesar 50,11 persen terhadap total pengeluaran, namun pada tahun 2017 proporsinya hanya mencapai 49,31 persen dari total pengeluaran. Sebaliknya, proporsi pengeluaran untuk makanan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Meskipun persentasenya sedikit berfluktuasi, tetapi proporsi pengeluaran makanan cenderung lebih besar dibandingkan pengeluaran bukan makanan selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

**Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Klungkung, 2016-2017**

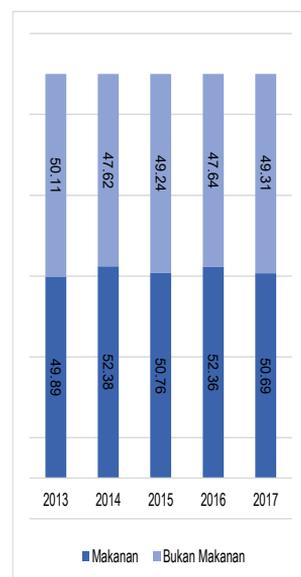
Jenis Pengeluaran	Nominal (000 Rp)		Proporsi (Persen)	
	2016	2017	2016	2017
<b>Makanan</b>	402,681	406,485	52.36	50.69
<b>Bukan Makanan</b>	366,450	395,462	47.64	49.31
<b>Jumlah</b>	769,131	801,947	100.00	100.00

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

## Pendapatan Rumah Tangga

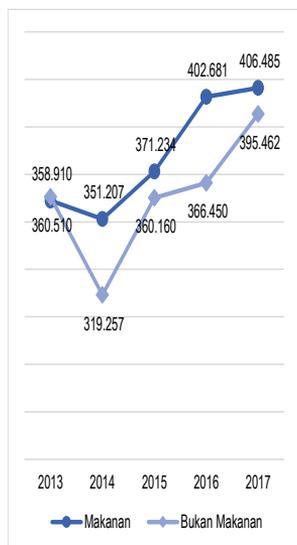
Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional. Ketimpangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan 40 persen terbawah terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut:

**Gambar 5.1**  
Persentase Pengeluaran Per Kapita Klungkung Menurut Jenis Pengeluaran (Persen), 2013-2017



Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Gambar 5.2  
Pengeluaran Per Kapita  
Klungkung Menurut Jenis  
Pengeluaran (000 Rp),  
2013-2017



Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

- memperoleh <12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- memperoleh >17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan ulasan ini menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Mengacu pada kriteria Bank Dunia di atas, ketimpangan pendapatan penduduk di Klungkung tahun 2017 dapat dikatakan rendah (*low inequality*). Porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen pendapatan terbawah mencapai 18,92 persen. Namun demikian, angka ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini terlihat dari distribusi pendapatan yang dinikmati penduduk terbawah yang cenderung menurun sejak tahun 2014. Porsi pengeluaran 40 persen kelompok terbawah ini mampu mencapai angka 19,98 persen di tahun 2014.

Tabel 5.2 Distribusi Pendapatan Kabupaten Klungkung, 2013-2017

Distribusi Pendapatan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>40 Persen Bawah</b>	18.84	19.98	19.54	18.99	18.92
<b>40 Persen Sedang</b>	35.26	35.51	34.64	36.52	35.03
<b>20 Persen Tinggi</b>	45.90	44.51	45.82	44.48	46.25

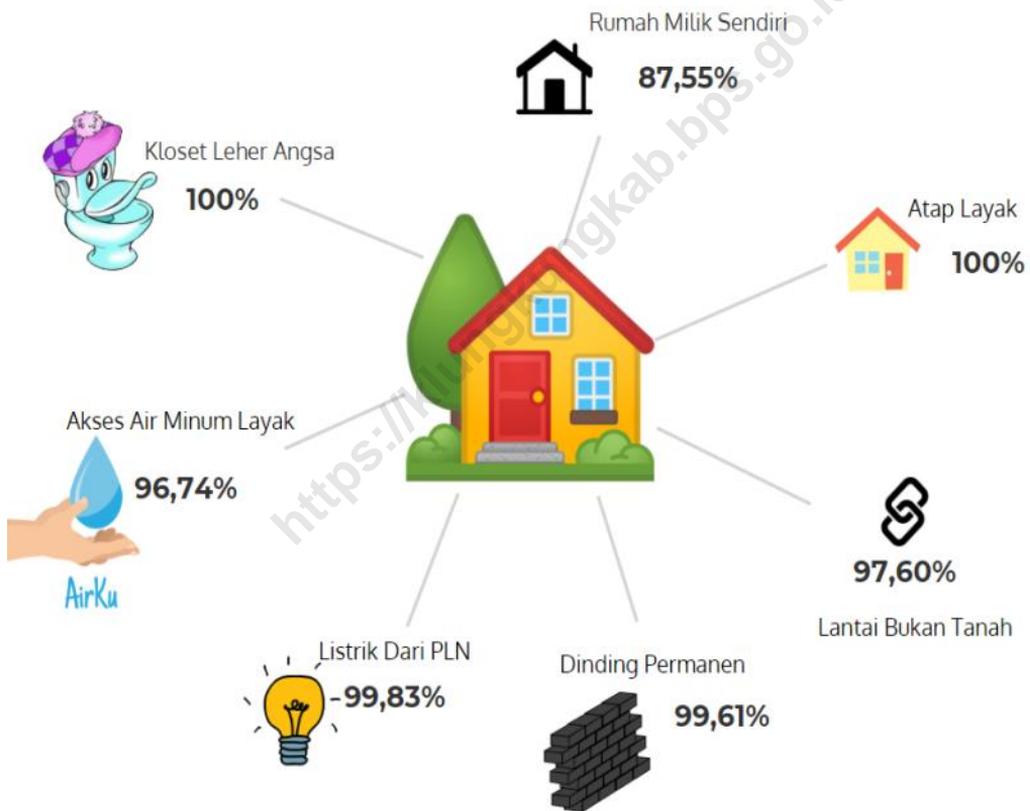
Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Selain indikator di atas, salah satu indikator lainnya yang sering digunakan untuk melihat ketimpangan antar wilayah yakni *Gini Ratio*. Berdasarkan data sejak tahun 2011, *Gini Ratio* Klungkung cenderung berfluktuasi menurun pada kisaran 0,35 hingga 0,38 yang artinya ketimpangan pendapatan pun cenderung menurun. *Gini Ratio Klungkung* tercatat sebesar 0,36 pada tahun 2016, kemudian meningkat menjadi sebesar 0,37 pada tahun 2017.



# Anatomy of House

Klungkung, 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung

## PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Perumahan diartikan sebagai sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal. Adapun rumah sendiri dapat diartikan sebagai salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah atau yang dikenal istilahnya dengan papan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan.

Dewasa ini, rumah menjadi salah satu jati diri pemiliknya. Tak hanya menjadi tempat tinggal sesuai fungsinya, rumah dijadikan sebagai *lifestyle*. Klungkung sendiri merupakan daerah dengan harga rumah atau properti yang cukup tinggi. Mengingat wilayah Klungkung cukup kecil dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain di Bali.

Menurut Depkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat, yaitu: pertama, dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain *privacy* yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas *vector* penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan

minuman dari pencemaran. Keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah.

Definisi rumah sehat lainnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 162 dan 163 yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada pasal 163 ayat 2 mengamanatkan bahwa lingkungan sehat antara lain mencakup lingkungan permukiman. Salah satu upaya mewujudkan lingkungan sehat dengan peningkatan rumah sehat. Rumah sehat sendiri merupakan rumah yang memenuhi kriteria minimal: akses air minum, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan (Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Permenkes Nomor 1077/PERV/MENKES/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah).

Selain sehat, sebuah rumah juga harus layak huni. Salah satu konsep rumah layak huni yang digunakan adalah konsep dari Kementerian Perumahan Rakyat. Variabel yang dilihat antara lain kualitas dari jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah. (Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota). Dalam publikasi ini akan dibahas mengenai karakteristik rumah berdasarkan kualitas, fasilitas, dan status kepemilikannya.

### **Kualitas Rumah Tinggal**

Kualitas rumah tinggal yang baik akan membuat penghuninya merasa aman, terlindung, dan terjamin kesehatannya. Ada beberapa indikator yang menunjukkan kualitas rumah tinggal yakni rumah dengan lantai bukan tanah, rumah dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes, serta dinding yang terbuat dari

tembok atau kayu.

Salah satu indikator yang menentukan kualitas rumah yang baik adalah dilihat dari lantainya. BPS sendiri mengklasifikasikan lantai menjadi beberapa kategori yakni lantai marmer, keramik, ubin/tegel/teraso, kayu/papan kualitas tinggi, semen/bata merah, bambu, kayu/papan kualitas rendah, dan tanah.

**Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Jenis Lantai Terluas	2016	2017
<b>Marmer/Granit</b>	1.33	0.83
<b>Keramik</b>	72.19	73.78
<b>Ubin/Tegel/Teraso</b>	2.99	1.55
<b>Semen/Bata Merah</b>	22.80	21.44
<b>Tanah</b>	0.69	2.40

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan lantai tanah tercatat sebesar 2,40 persen. Lebih tinggi jika dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yang mencapai 0,69 persen. Terlihat bahwa sebagian besar rumah penduduk Klungkung sudah menggunakan lantai keramik dan semen yakni masing-masing sebesar 73,78 persen dan 21,44 persen. Dari gambaran ini kiranya dapat dikatakan kualitas perumahan dari sisi lantai yang digunakan sudah semakin baik.

Selain lantai, atap rumah pun mempengaruhi kualitas rumah. Atap yang baik memiliki klasifikasi atap yang mampu melindungi rumah dari perubahan cuaca baik panas, hujan, petir, angin, debu, dan sebagainya. Atap yang layak adalah atap yang terbuat dari beton, genteng, sirap, seng dan asbes.

Dilihat dari sisi atap yang digunakan, kondisi perumahan di Klungkung dapat dikatakan telah memenuhi standar layak. Pada

tahun 2017, seluruh (100 persen) rumah di Klungkung sudah menggunakan atap yang dianggap layak yakni yang terbuat dari beton, genteng, sirap, seng, dan asbes. Kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 99,60 persen.

**Tabel 6.2 Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Jenis Atap Terluas	2016	2017
Beton	1.69	2.10
Genteng	91.20	87.69
Asbes	2.85	7.03
Seng	3.86	3.18
Jerami/ljuk/Daun/Rumbia	0.39	0.00
Lainnya	0.00	0.00

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Dinding rumah merupakan salah satu elemen yang penting pada suatu bangunan rumah. Dinding yang kokoh dapat melindungi penghuninya dari ancaman gempa maupun penyakit. Pada tahun 2017, persentase rumah tangga di Klungkung yang menggunakan dinding tembok pada rumahnya adalah sebesar 99,61 persen. Sisanya 0,39 persen masih ber dinding kayu/papan dan anyaman bambu.

**Tabel 6.3 Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Jenis Dinding Terluas	2016	2017
Tembok	99.42	99.61
Plesteran Anyaman Bambu/Kawat	0.39	0.00
Kayu/Papan	0.00	0.13
Anyaman Bambu	0.19	0.26

Selanjutnya kualitas rumah juga diukur dari rata-rata luas lantai per kapita. Luas lantai per kapita sendiri dapat diartikan sebagai luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya.

Dari sisi luas lantai per kapita, sebagian besar rumah tangga memiliki luas lantai per kapita di atas 10m<sup>2</sup>, artinya secara rata-rata setiap anggota rumah tangga mempunyai ruang lebih dari 10m<sup>2</sup>. Namun demikian, dari sisi persentase mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 lalu. Persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita lebih dari 10m<sup>2</sup> pada tahun 2016 mencapai 81,73 persen. Sementara pada tahun 2017 persentasenya tercatat turun menjadi hanya sebesar 79,31 persen.

Di sisi lain, persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita 7,3-9,9m<sup>2</sup> turun dari 12,37 persen pada tahun 2016 menjadi 11,06 persen pada tahun 2017. Sementara persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2m<sup>2</sup> meningkat dari 5,90 persen di tahun 2016 menjadi 9,63 persen di tahun 2017.

**Tabel 6.4 Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Luas Lantai Per Kapita (M <sup>2</sup> )	2016	2017
≤ 7.2	5.90	9.63
7.3-9.9	12.37	11.06
≥ 10	81.73	79.31

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

### Fasilitas Rumah Tinggal

Selain kondisi fisik rumah (atap, lantai, dinding), fasilitas rumah tinggal yang baik sudah tentu akan menambah kenyamanan dan kemudahan dalam beraktifitas serta meningkatkan derajat kesehatan penghuninya. Fasilitas rumah tangga terkait dengan

ketersediaan air bersih untuk minum, ketersediaan jamban, dan listrik untuk penerangan rumah tangga.

Indikator pertama yang digunakan untuk melihat fasilitas rumah tinggal yang baik adalah akses rumah tangga terhadap sumber air minum. Air minum bersih didefinisikan sebagai air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangi septik) > 10 m.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum bersih di tahun 2017 adalah sebesar 81,35 persen. Persentase ini meningkat dibandingkan kondisi tahun 2016 yang mencapai 78,50 persen. Sama halnya dengan akses terhadap air minum layak. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 96,74 persen pada tahun 2017, naik jika dibandingkan tahun 2016 yang tercatat hanya sebesar 95,95 persen.

Jarak sumber air minum (sumur atau pompa) dengan pembuangan tinja idealnya di atas 10 meter. Namun hal ini kiranya sulit dipenuhi mengingat kondisi perumahan sekarang semakin sempit dan berdekatan. Walaupun demikian persentase rumah tangga dengan jarak sumber air minum di atas 10 meter dari pembuangan tinja meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang memenuhi kriteria ini mencapai 72,90 persen. Sementara pada tahun 2017 persentasenya naik menjadi sebesar 73,98 persen.

Dari sisi cara memperoleh air minum, sebagian besar rumah tangga memperoleh air minum dengan cara membeli. Persentasenya mencapai 70,97 persen pada tahun 2017. Hal ini berarti kualitas air minum sudah cukup baik dengan asumsi kualitas air minum yang diperdagangkan lebih baik. Namun pada kondisi tertentu hal tersebut menunjukkan keterbatasan akses bagi penduduk dengan pendapatan rendah.

Indikator selanjutnya yang bermanfaat untuk mengukur kelayakan sanitasi adalah kepemilikan jamban. Persentase rumah

tangga di Klungkung yang sudah memiliki jamban sendiri pada tahun 2017 sebesar 78,55 persen, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2016 yang sebesar 68,04 persen. Jamban yang memenuhi syarat kesehatan merupakan jamban yang pembuangan terakhirnya menggunakan leher angsa/tangki septik. Pada tahun 2017, persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan leher angsa sudah mencapai 100 persen. Sementara yang pembuangan terakhirnya menggunakan tangki septik sebesar 99,31 persen.

Fasilitas rumah lainnya adalah ada atau tidaknya sumber penerangan di rumah tangga. Secara umum, seluruh rumah tangga di Klungkung menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang teraliri listrik mencapai 99,83 persen.

**Tabel 6.5 Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Fasilitas Perumahan	2016	2017
Akses Air Bersih	78.50	81.35
Akses Air Minum Layak	95.95	96.74
Jarak Pompa Dengan Pembuangan Tinja $\geq 10m$	72.90	73.98
Air Minum Dengan Membeli	69.60	70.97
Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	68.04	78.55
Jenis Jamban/Kloset Leher Angsa	99.60	100.00
Pembuangan Akhir Menggunakan Tangki/Spal	85.73	99.31
Sumber Penerangan Listrik	100.00	99.83
Bahan Bakar Memasak Menggunakan Listrik/Gas	67.32	68.32

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Jenis bahan bakar yang sering digunakan untuk memasak kiranya dapat menjadi indikator kualitas dari fasilitas perumahan. Apalagi belakangan ini program alih energi dari bahan bakar minyak

ke bahan bakar gas gencar dilakukan. Bahan bakar gas dinilai lebih rendah polusi dan lebih hemat energi. Sebagian besar rumah tangga di Klungkung sudah menggunakan bahan bakar listrik/gas untuk keperluan memasak. Pada tahun 2017 persentasenya mencapai 68,32 persen, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 67,32 persen.

### Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati karena dengan indikator ini dapat diperoleh gambaran tentang kemampuan penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu tersedianya rumah layak huni. BPS sendiri mengklasifikasikan status kepemilikan rumah menjadi beberapa kategori yakni milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, dan lainnya.

Pada tahun 2017, proporsi rumah tangga dengan status rumah milik sendiri di Kabupaten Klungkung adalah sebesar 87,55 persen. Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 90,23 persen. Sementara itu, rumah tangga yang menempati rumah kontrak atau sewa tercatat sebesar 3,55 persen, menurun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 5,91 persen.

**Tabel 6.6 Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Status Kepemilikan Rumah	2016	2017
Milik Sendiri	90.23	87.55
Kontrak/Sewa	5.91	3.55
Bebas Sewa	3.35	7.45
Dinas	0.51	1.26
Lainnya	0.00	0.19

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Penurunan persentase kepemilikan rumah milik sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah mahalnya harga rumah atau properti yang ada di Klungkung. Harga rumah di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Pada kondisi ini menyewa rumah tentu menjadi pilihan alternatif bagi penduduk di wilayah perkotaan.

<https://klungkungkab.bps.go.id>

# 5

# Indikator

## KEMISKINAN KLUNGKUNG 2017

1



Jumlah  
Penduduk  
Miskin

11,15 (ribu jiwa)

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

2



Garis Kemiskinan

(per kapita per bulan)

Rp 299.664

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan

3



Persentase Penduduk Miskin

6,29 %

- TURUN 0,06 poin dibandingkan tahun 2016
- Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan

4



P<sub>1</sub> Indeks  
Kedalaman  
Kemiskinan

0,33

- Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

P<sub>2</sub>

Indeks Keparahan Kemiskinan

0,04

- Gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin

# KEMISKINAN

## Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah bersangkutan. Namun terkadang pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bahkan tetap menyisakan kemiskinan bagi sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor-faktor produksi yang tersedia, maupun hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu proses pembangunan ekonomi tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang terjadi, beberapa metode yang biasa digunakan adalah metode *Head Count Index*. Menurut metode ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan. Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, maka terlebih dahulu harus dihitung garis kemiskinannya.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan

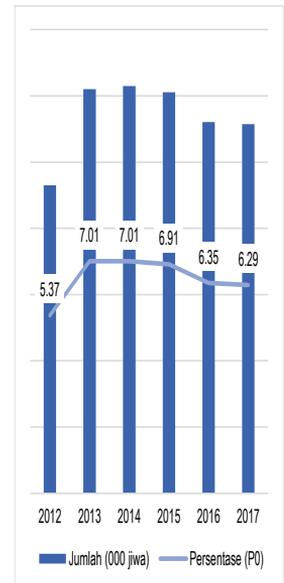
(perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya). Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kilokalori per hari. (Hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978).

Agar seseorang dapat dikatakan hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu juga dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas kebutuhan minimum untuk makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang disebut Garis Kemiskinan. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan dan jika pengeluarannya di bawah garis tersebut, maka yang bersangkutan akan dikategorikan miskin.

Berdasarkan hasil pendataan Susenas Maret 2017, Garis Kemiskinan (GK) Klungkung mencapai Rp299.664 per kapita per bulan. Kondisi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan Maret 2016 yang sebesar Rp284.789 per kapita per bulan. Sementara itu, kemiskinan Klungkung tercatat sebesar 6,29 persen pada Maret 2017. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Maret 2016 yang sebesar 6,35 persen.

Selama kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2017, tren angka kemiskinan Klungkung cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung adalah sebesar 6,10 persen, sampai dengan tahun 2012 persentase kemiskinan Klungkung bergerak menurun sampai menyentuh persentase terendah yakni sebesar 5,37 persen. Namun, pada tahun 2013 hingga tahun 2014, kemiskinan Klungkung cenderung stagnan di angka 7,01 persen. Kemudian mulai bergerak menurun kembali pada Maret 2015 hingga Maret 2017.

Gambar 7.1  
Jumlah dan Persentase  
Penduduk Miskin Klungkung,  
2012-2017



Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

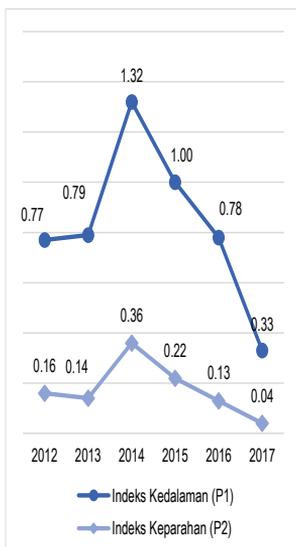
Jika dilihat dari sisi jumlah penduduk miskin, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin Klungkung tercatat sebesar 11,15 ribu jiwa. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 11,21 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klungkung tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung khususnya melalui program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan seperti program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), beasiswa bagi penduduk miskin, program bedah rumah, bantuan beras miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Gerbang Sadu Mandara (GSM), Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI).

### Indeks kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Selain garis kemiskinan, indeks yang digunakan untuk melihat indikator lain dari kemiskinan yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman mengandung arti sejauh mana rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gaps Index* ( $P_1$ ) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan.

Sementara itu, untuk melihat masalah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin digunakan ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* ( $P_2$ ). Indeks ini secara sederhana merupakan jumlah dari *poverty gap* tertimbang yang penimbangnya sebanding dengan *poverty gap* itu sendiri. Dengan mengkuadratkan *poverty gap*, indeks ini secara implisit memberikan penimbang yang lebih pada unit observasi yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 7.2  
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Klungkung, 2012-2017



Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Indeks kedalaman Klungkung sebesar 0,78 pada bulan Maret 2016, nilai tersebut turun menjadi 0,33 pada kondisi bulan Maret 2017. Hal ini mengindikasikan semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan (GK). Meningkatnya GK yang diikuti oleh semakin kecilnya nilai dari  $P_1$  menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin bertambah setiap tahunnya yang secara langsung berarti semakin besar jumlah uang yang dibelanjakan oleh mereka.

Di sisi lain, indeks keparahan Klungkung juga menurun sepanjang Maret 2016 sampai dengan Maret 2017. Pada Bulan Maret 2016, nilai  $P_2$  mencapai 0,13 dan pada bulan Maret 2017 nilainya menurun menjadi 0,04. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Dengan kata lain sebaran penduduk miskin lebih homogen dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau ruang lingkup kondisi pengeluaran lebih spesifik dan kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 7.1 Indikator Kemiskinan Klungkung, 2016-2017**

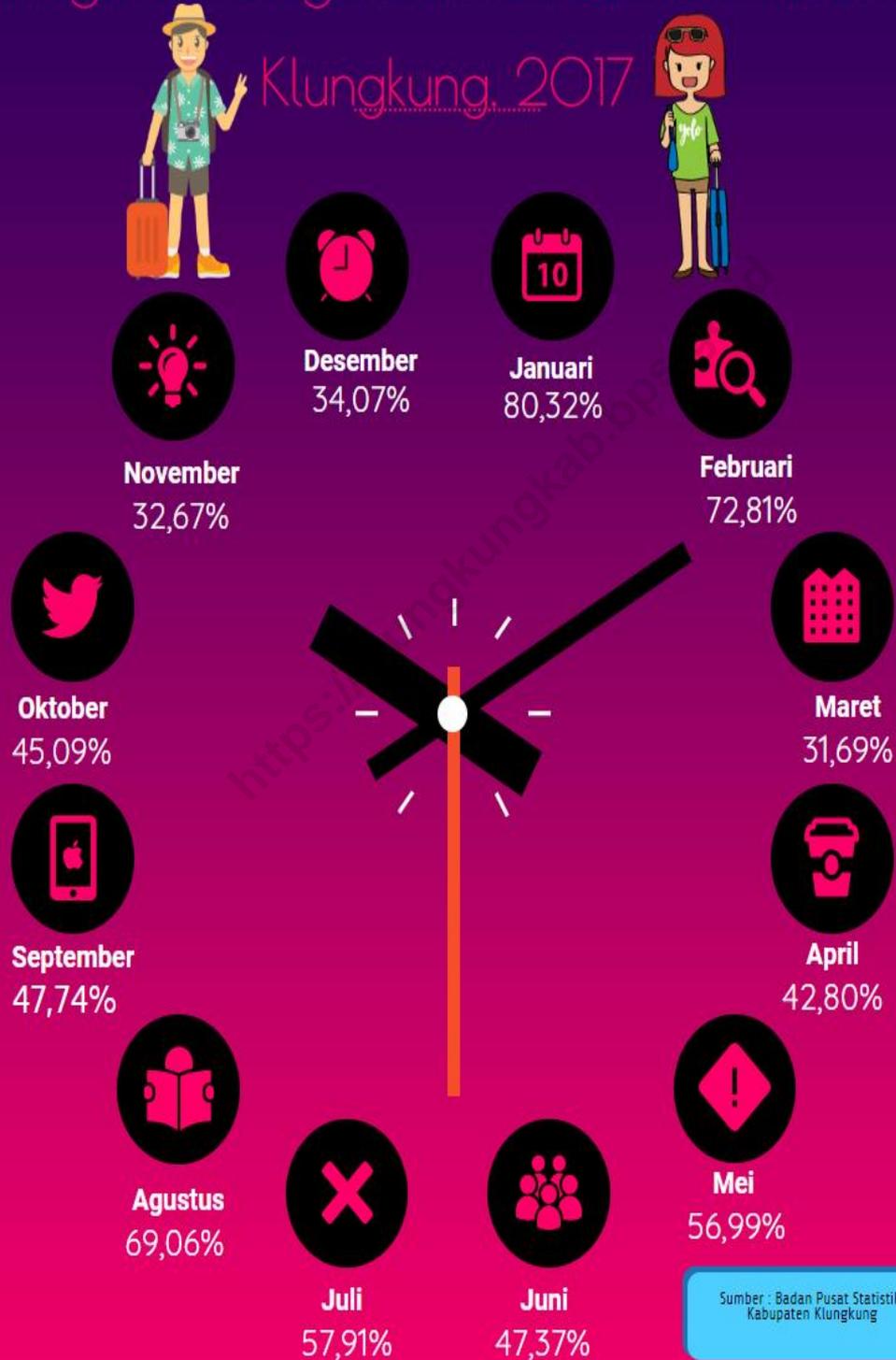
Indikator Kemiskinan	Maret 2016	Maret 2017
<b>Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)</b>	284,789	299.664
<b>Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)</b>	11.21	11.15
<b>Persentase Penduduk Miskin (<math>P_0</math>)</b>	6.35	6.29
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (<math>P_1</math>)</b>	0.78	0.33
<b>Indeks Keparahannya Kemiskinan (<math>P_2</math>)</b>	0.13	0.04

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung



# Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Klungkung, 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung

## SOSIAL LAINNYA

Selain tujuh aspek yang menunjukkan kesejahteraan rumah tangga di Klungkung, ada aspek sosial lainnya yang juga mampu menunjukkan hal yang sama, antara lain: intensitas penduduk dalam bepergian, akses terhadap bantuan sosial seperti beras miskin (Raskin), bantuan siswa miskin (BSM), dan kredit usaha; jenis kepemilikan aset di rumah tangga; serta tindak kejahatan.

### Intensitas Penduduk Untuk Bepergian

Salah satu aktivitas penduduk yang dicatat dalam Susenas adalah aktivitas bepergian. Yang dimaksud dengan bepergian dalam konsep Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela, dengan waktu kurang dari 6 bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan), serta bukan bertujuan untuk sekolah atau bekerja secara rutin.

**Tabel 8.1 Persentase Penduduk Yang Bepergian Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2016-2017**

Jenis Kelamin	2016	2017
Laki-laki	12.71	10.26
Perempuan	10.71	7.67
Laki-laki dan Perempuan	11.70	8.95

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Tercatat terjadi penurunan intensitas penduduk Klungkung dalam melakukan bepergian pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, sebesar 11,70 persen penduduk yang bepergian, sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 8,95 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, intensitas

penduduk laki-laki dalam bepergian lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2017, sekitar 10,26 persen penduduk laki-laki bepergian, sedangkan penduduk perempuan hanya 7,67 persen yang bepergian dalam periode yang sama.

### **Kepemilikan Jaminan Sosial**

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kepemilikan dari jaminan sosial. Berbagai jenis jaminan sosial seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian dan pesangon pemutusan kerja (PHK) merupakan jenis-jenis jaminan yang sering diterima oleh masyarakat.

Jaminan pensiun/veteran adalah jaminan yang diterima oleh ASN, TNI dan Polri yang telah memasuki masa purna bakti dan biasanya berwujud uang tunai dan diterima setiap bulan. Jaminan hari tua adalah program jaminan yang ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Asuransi kecelakaan kerja adalah jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat melakukan kegiatan bekerja dimulai dari berangkat bekerja sampai pulang kembali ke rumah. Jaminan Asuransi kematian adalah jaminan yang memberikan jaminan manfaat berupa santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia dan Pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah jaminan yang diberikan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha.

Seiring waktu dengan semakin berkembangnya teknologi membuat masyarakat semakin menyadari akan pentingnya kepemilikan akan asuransi ataupun jaminan sosial. Hal ini terlihat

dari meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki jaminan sosial. Selama tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan pensiun/veteran sebesar 8,30 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan angka tahun 2016 yang hanya sebesar 6,27 persen. Seperti halnya jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja dan jaminan/asuransi kematian juga mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2016. Sedangkan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) mengalami penurunan dari 1,83 persen pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar 1,46 persen pada tahun 2017.

**Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Jenis Jaminan Sosial	2016	2017
Jaminan Pensiun/Veteran	6.27	8.30
Jaminan Hari Tua	1.30	4.00
Asuransi Kecelakaan Kerja	1.89	3.93
Jaminan/Asuransi Kematian	1.53	4.05
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1.83	1.46

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

### Akses Terhadap Bantuan Sosial

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui diluncurkannya berbagai program-program perlindungan sosial. Terdapat beberapa jenis program perlindungan sosial yang ditujukan untuk rumah tangga miskin antara lain bantuan Beras Miskin (Raskin), kredit usaha, serta Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program raskin diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu pangan. Sehingga setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, diharapkan masyarakat

dapat memanfaatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Rumah tangga yang menerima bantuan sosial Raskin di Klungkung mengalami penurunan pada tahun 2017. Persentase rumah tangga yang menerima Raskin hanya sebesar 11,90 persen pada tahun 2017, jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 21,13 persen.

Selain Raskin, kredit usaha juga diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya membantu permodalan masyarakat dalam melakukan usaha. Melalui program ini diharapkan dapat membantu usaha/industri rumah tangga untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Salah satu program kredit usaha yang sedang digulirkan bagi masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**Tabel 8.3 Rumah Tangga Menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Jenis Kredit Usaha	2016	2017
PNPM Mandiri	0.77	0.00
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	17.18	37.91
Program Bank Selain KUR	4.20	16.05
KUBE/KUB	1.73	1.60
Program Koperasi	8.39	24.99
Perorangan Dengan Bunga	1.83	4.72
Lainnya	5.97	28.75

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

KUR merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Dengan bunga yang ringan dan kemudahan

dalam memperoleh fasilitas kredit diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membuka atau meningkatkan usahanya.

Berbeda halnya dengan Raskin, persentase rumah tangga di Kabupaten Klungkung yang menerima kredit usaha mengalami peningkatan pada tahun 2017. Jika pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha hanya sebesar 32,81 persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 46,61 persen pada tahun 2017.

Jenis program perlindungan sosial yang juga sangat bermanfaat bagi masyarakat adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuan utama dari diluncurkannya PIP adalah untuk memastikan anak-anak dari rumah tangga miskin tetap mampu bersekolah. Dengan bersekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupan keluarganya, sehingga mampu keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

**Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga Yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Klungkung, 2017**

Jenis Program Indonesia Pintar	2017
PIP SD Sederajat	71.19
PIP SMP Sederajat	36.68
PIP SM Sederajat	16.02

*Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung*

PIP ini diberikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, yaitu PIP SD, SMP, dan SM. Pada dasarnya program PIP merupakan kelanjutan dari program BSM dan cakupannya tidak hanya siswa miskin tetapi juga mencakup siswa rentan miskin, putus sekolah dan anak penyandang masalah kesehatan sosial.

## Kepemilikan Aset

Indikator lainnya yang juga dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah kepemilikan aset. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, pada umumnya akan sejalan dengan ragam aset yang dimiliki. Dalam pengumpulan data Susenas, masyarakat ditanyakan terkait kepemilikan aset mulai dari tabung gas 5,5kg atau lebih, lemari es/kulkas, AC, pemanas air, emas/perhiasan (minimal 10gram), sepeda motor, perahu, perahu motor, serta mobil.

**Tabel 8.5 Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset di Kabupaten Klungkung (Persen), 2016-2017**

Jenis Kepemilikan Aset	2016	2017
Tabung Gas 5,5 Kg Atau Lebih	16.56	17.25
Lemari Es/Kulkas	50.21	52.32
AC	4.52	5.71
Pemanas Air	1.53	2.89
Emas/Perhiasan Minimal 10 Gram	29.77	33.10
Sepeda Motor	82.65	81.42
Perahu	0.20	0.92
Perahu Motor	1.31	1.21
Mobil	14.12	11.53

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Hampir 85 persen rumah tangga di Klungkung memiliki sepeda motor. Pada tahun 2017, sekitar 81,42 persen rumah tangga memiliki sepeda motor. Hal ini sangat wajar, mengingat sepeda motor merupakan sarana transportasi utama di Pulau Bali. Sama halnya dengan sepeda motor, kepemilikan mobil mengalami penurunan di tahun 2017. Jika pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang memiliki mobil sebesar 14,12 persen, kemudian menurun menjadi 11,53 persen pada tahun 2017.

Kulkas juga menjadi salah satu aset yang tinggi persentase kepemilikannya di Klungkung. Sekitar 52,32 persen rumah tangga di Klungkung sudah memiliki kulkas pada tahun 2017. Jenis aset lainnya yang juga cukup tinggi persentasenya adalah emas/perhiasan dengan berat minimal 10 gram serta tabung gas 5,5 atau lebih. Pada tahun 2017 persentasenya masing-masing sebesar 33,10 persen dan 17,25 persen.

### Korban Tindak Kejahatan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat keamanan di suatu wilayah. Semakin sejahtera suatu wilayah, maka diasumsikan akan semakin rendah tingkat kejahatan yang terjadi. Selama tahun 2017, persentase penduduk Klungkung yang pernah menjadi korban kejahatan adalah sebesar 0,62 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 0,56 persen.

**Tabel 8.6 Persentase Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2016-2017**

Jenis Kelamin	2016	2017
Laki-laki	0.66	0.58
Perempuan	0.46	0.66
Laki-laki dan Perempuan	0.56	0.62

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Klungkung

Dirinci menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2017, sekitar 0,58 persen penduduk laki-laki menjadi korban kejahatan, menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 0,66 persen. Sementara itu penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 0,46 persen, kemudian menjadi sebesar 0,66 persen pada tahun 2017.



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://klungkungkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Jalan Raya Besakih, Akah, Semarapura, Klungkung  
Telp. (0366) 21180 Fax. (0366) 24242  
E-mail: [bps5105@bps.go.id](mailto:bps5105@bps.go.id)  
Homepage : <http://banglikab.bps.go.id>

ISBN 978-602-6840-34-9



9 786026 840349